

Sinergi Antara Tata Kelola Perusahaan Dan Pertumbuhan Bisnis Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Perusahaan BUMN Nonkeuangan di Bursa Efek Indonesia)

¹Christania Hernita Natasha Mohammad*Program Studi D-IV Akuntansi Sektor Publik
Politeknik Keuangan Negara STAN*4131210023_christania@pknstan.ac.id**²Dimas Eka Saputra***Program Studi D-IV Akuntansi Sektor Publik
Politeknik Keuangan Negara STAN*4131210003_dimas@pknstan.ac.id**³Meifa Zuhrotul Abdur Rohman***Program Studi D-IV Akuntansi Sektor Publik
Politeknik Keuangan Negara STAN*4131210061-meifa@pknstan.ac.id**⁴Muhammad Farrel Abigail Athallah***Program Studi D-IV Akuntansi Sektor Publik
Politeknik Keuangan Negara STAN*41321210049_muhammad@pknstan.ac.id**⁵Ni Komang Linda Agiastini***Program Studi D-IV Akuntansi Sektor Publik
Politeknik Keuangan Negara STAN*4131210036_komang@pknstan.ac.id**⁶Riana Adesta Fitri***Program Studi D-IV Akuntansi Sektor Publik
Politeknik Keuangan Negara STAN*4131210042_riana@pknstan.ac.id**⁷Reskino***Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*reskino@uinjkt.ac.id

Copyright © 2024 JAST, Journal of Accounting Science and Technology is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan pertumbuhan perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 20 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI selama periode 2018 hingga 2022, dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dan analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi Stata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Return on Equity (ROE), sedangkan Komite Audit dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan empiris tentang pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan pada perusahaan non-keuangan, khususnya yang terdaftar di BEI, yang selama ini kurang menjadi fokus dalam penelitian terdahulu. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan unik yang menyoroti sektor non-keuangan, di mana sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada sektor perbankan atau keuangan. Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pada periode waktu lima tahun, memberikan gambaran yang lebih dinamis dan kontekstual terhadap perubahan dalam pengelolaan GCG dan pertumbuhan perusahaan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan

perspektif baru mengenai dampak GCG dalam industri yang kurang terpapar dan memberikan bukti empiris dalam konteks ekonomi Indonesia. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa perusahaan perlu mengevaluasi efektivitas Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit dalam menjaga kinerja keuangan serta mempertimbangkan pengelolaan GCG yang lebih strategis dan menyeluruh untuk meningkatkan kinerja keuangan di masa mendatang.

Keywords: *Good Corporate Governance, pertumbuhan perusahaan, kinerja keuangan.*

1. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh negara untuk menjalankan kegiatan yang berdampak signifikan pada sektor industri dan sosial. Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Salah satu tujuan utama BUMN adalah berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional serta penerimaan negara. Pada tahun 2023, Kementerian BUMN berhasil merealisasikan dividen tunai sebesar Rp82,1 triliun ke kas negara, meningkat sebesar 102,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa BUMN mampu meningkatkan kinerjanya, terutama di bidang keuangan, dengan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.

Namun, di tengah peningkatan kinerja keuangan beberapa BUMN, muncul fenomena penyelewengan dalam pengelolaan keuangan yang menyebabkan kerugian negara dalam skala besar. Pada tahun 2023, PT Asabri terlibat dalam dugaan penyalahgunaan investasi yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp22 triliun. Fenomena serupa juga terjadi di PT Jiwasraya, yang terlibat dalam skandal keuangan akibat pelanggaran Good Corporate Governance (GCG), sehingga menimbulkan kerugian lebih dari Rp16 triliun. Kasus-kasus ini menunjukkan kelemahan dalam penerapan GCG, khususnya dalam pengawasan oleh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit. Penyelewengan-penyelewengan tersebut tidak hanya menurunkan kinerja perusahaan, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan stabilitas keuangan nasional. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat penerapan GCG di BUMN sebagai upaya menjaga stabilitas dan transparansi keuangan.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja keuangan BUMN adalah penerapan Good Corporate Governance (GCG). GCG merupakan sistem tata kelola yang dirancang untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan menciptakan pengelolaan yang profesional serta mandiri (OECD, 2004). Menurut FCGI (2001), GCG mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan, pemerintah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Penerapan GCG yang efektif dapat mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang timbul dari konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen (Jensen & Meckling, 1976), serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan yang pada akhirnya memengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat beberapa BUMN besar seperti PT Waskita Karya dan PT Garuda Indonesia juga terlibat dalam kasus penyelewengan yang signifikan akibat penerapan GCG yang lemah. Kasus PT Waskita Karya, yang terlibat dalam korupsi proyek Tol Kriya Legundi Bunder Manyar (KLBM) yang merugikan negara sebesar Rp2,54 triliun, serta manipulasi laporan keuangan oleh PT Garuda Indonesia, menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG dapat menyebabkan kerugian besar tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi perekonomian negara secara keseluruhan. Kondisi ini memunculkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat penerapan GCG di BUMN, terutama dalam pengawasan Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit. Dengan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara, kegagalan dalam tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, meskipun terdapat penelitian

sebelumnya yang membahas pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan, sebagian besar penelitian ini masih berfokus pada sektor perbankan dan keuangan (Purwanto, 2018; Utami, 2019). Studi yang mengeksplorasi BUMN non-keuangan masih terbatas, dan jarang ada penelitian yang menganalisis penerapan GCG dalam jangka panjang.

Penelitian terdahulu telah banyak membahas peran GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Misalnya, Prasinta (2012) menemukan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BUMN non-keuangan yang diukur dengan ROE. Temuan serupa diperoleh oleh Siregar (2016), yang menunjukkan bahwa komite audit yang efektif mampu memperkuat pengawasan manajemen dan mengurangi risiko keuangan. Nuryaman (2014) menyoroti pentingnya pertumbuhan perusahaan sebagai faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, meskipun penelitiannya lebih terfokus pada sektor keuangan.

Namun, banyak penelitian yang masih menghasilkan temuan yang kontradiktif. Surya dan Yustiavandana (2008) menyoroti bahwa penerapan GCG pada beberapa BUMN masih jauh dari optimal, sehingga menyebabkan penurunan kinerja keuangan. Penelitian sebelumnya oleh Wirawan (2015) dan Pratama (2017) menyoroti pentingnya Dewan Komisaris Independen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan, namun keduanya mencatat bahwa peran komite audit masih kurang efektif dalam meningkatkan pengawasan internal, terutama pada BUMN. Nurlaily (2020) juga menyoroti adanya kurangnya penelitian jangka panjang yang memadai untuk mengevaluasi dampak penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan pertumbuhan perusahaan terhadap kinerja keuangan BUMN non-keuangan yang terdaftar di BEI, yang diukur menggunakan ROE. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperluas pemahaman mengenai peran GCG pada BUMN non-keuangan, serta menghubungkan teori keagenan dan teori stewardship untuk memahami hubungan antara mekanisme GCG dan kinerja keuangan perusahaan.

2. Kajian Teori

Teori Keagenan

Teori keagenan, yang diperkenalkan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976, menjelaskan hubungan antara principal (pemberi kuasa) dan agent (pelaksana) dalam organisasi, di mana principal memberikan otoritas pengambilan keputusan kepada agent. Namun, karena kedua pihak berupaya memaksimalkan kepentingan mereka masing-masing (utility maximizers), muncul potensi konflik di mana agent tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan principal. Oleh karena itu, principal perlu menerapkan mekanisme pengendalian seperti insentif dan pengawasan (monitoring) untuk memastikan agen bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan dan principal.

Dalam konteks penelitian ini, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang bertindak sebagai alat monitoring bagi principal (pemegang saham atau pemilik modal) terhadap agent (manajemen atau eksekutif perusahaan). Peran Dewan Komisaris Independen, yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi manajemen, dan Komite Audit, yang bertugas untuk memeriksa dan memastikan transparansi laporan keuangan, sangat penting untuk mengurangi biaya keagenan. Dengan

adanya pengawasan dari kedua entitas ini, diharapkan terjadi pengurangan tindakan oportunistik oleh agen yang mungkin bertindak di luar kepentingan pemilik perusahaan.

Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit sebagai variabel yang dapat mengurangi konflik kepentingan antara principal dan agent. Keberadaan Dewan Komisaris Independen diharapkan mampu mengurangi residual loss dan meningkatkan kepatuhan manajemen dalam menjalankan kebijakan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik modal. Begitu pula, Komite Audit diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan melalui fungsi audit internal dan eksternal, yang bertujuan untuk memastikan keakuratan laporan keuangan serta mencegah kecurangan atau penyalahgunaan keuangan.

Selain itu, variabel pertumbuhan perusahaan juga terkait dengan teori keagenan. Dalam situasi di mana perusahaan mengalami pertumbuhan pesat, ada potensi meningkatnya biaya keagenan karena manajemen memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya, yang dapat dialokasikan untuk kepentingan mereka sendiri (agency problem). Oleh karena itu, dalam perusahaan dengan pertumbuhan yang tinggi, pengawasan yang lebih ketat dari Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar berdampak positif terhadap kinerja perusahaan dan sesuai dengan kepentingan principal.

Dengan demikian, teori keagenan relevan untuk memahami bagaimana pengawasan yang efektif oleh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit dapat mengurangi konflik kepentingan dan biaya keagenan, serta meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui Return on Equity (ROE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme Good Corporate Governance, yang diwakili oleh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit, serta pertumbuhan perusahaan dapat berkontribusi dalam mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan.

Teori Stewardship

Teori stewardship adalah teori manajemen yang mengasumsikan bahwa manajer dan karyawan cenderung memiliki motivasi yang positif dan pro-organisasi, dan mereka akan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang bertanggung jawab dan efektif. Teori ini menekankan pentingnya kepercayaan, partisipasi, dan komitmen dalam hubungan manajer-bawahan. Teori ini menjadi kritik terhadap teori keagenan yang mengasumsikan bahwa manajer dan karyawan cenderung memiliki motivasi yang egois dan berorientasi pada diri sendiri dan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka. Teori ini menekankan pentingnya kontrol, insentif, dan pengawasan dalam hubungan manajer-bawahan (Davis et al., 1977).

Perbedaan utama antara kedua teori ini adalah pandangan tentang tindakan manusia dan motivasi mereka dalam konteks organisasi. Teori stewardship mengasumsikan bahwa manusia cenderung memiliki motivasi yang positif dan pro-organisasi, sementara teori agensi mengasumsikan bahwa manusia cenderung memiliki motivasi yang egois dan berorientasi pada diri sendiri. Namun, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pendekatan stewardship dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik dan kepuasan kerja yang lebih tinggi daripada pendekatan keagenan, terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, banyak organisasi saat ini mulai menerapkan pendekatan stewardship dalam praktik manajemen mereka (Davis et al., 1977).

Mengadopsi pendekatan teori stewardship terhadap manajemen dapat memiliki beberapa implikasi praktis dan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Pertama, kepercayaan dan komitmen, teori ini menekankan pada pengembangan kepercayaan dan komitmen antara manajer dan karyawan. Hal ini dapat menghasilkan lingkungan kerja yang lebih kohesif dan kooperatif, di mana karyawan termotivasi untuk bertindak demi kepentingan terbaik organisasi. Kedua, pemberdayaan karyawan, teori stewardship mendorong memberi karyawan lebih banyak otonomi dan kekuatan pengambilan keputusan. Pemberdayaan ini dapat mengarah pada peningkatan kepuasan kerja, motivasi, dan kreativitas di antara karyawan, yang pada akhirnya berkontribusi pada produktivitas dan inovasi yang lebih tinggi dalam organisasi. Ketiga, orientasi jangka panjang, teori stewardship mempromosikan perspektif jangka panjang, di mana manajer dan karyawan berfokus pada pertumbuhan dan kesuksesan organisasi yang berkelanjutan daripada keuntungan pribadi jangka pendek. Hal ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang lebih strategis dan budaya organisasi yang lebih kuat.

Keempat, kinerja organisasi, penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang berorientasi pada stewardship mungkin mengalami peningkatan kinerja dan kemampuan beradaptasi, karena karyawan lebih cenderung menyelaraskan upaya mereka dengan tujuan keseluruhan organisasi. Hal ini dapat menyebabkan hasil keuangan yang lebih baik dan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Kelima, mengurangi pergantian, dengan menumbuhkan budaya kepercayaan, pemberdayaan, dan tanggung jawab bersama, teori stewardship dapat berkontribusi pada tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi. Karyawan yang merasa dihargai dan dipercaya lebih mungkin untuk tetap bersama organisasi, mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan. Terakhir, perilaku etis, teori stewardship mendorong perilaku etis dan rasa tanggung jawab terhadap organisasi dan pemangku kepentingannya. Hal ini dapat menyebabkan reputasi organisasi yang positif sehingga meningkatkan hubungan dengan pelanggan/mitra dan landasan etika yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan. Mengadopsi pendekatan teori stewardship terhadap manajemen dapat mengarah pada tenaga kerja yang lebih terlibat, berkomitmen, dan termotivasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi, keberlanjutan, dan perilaku etis dalam jangka panjang (Davis et al., 1977).

Good Corporate Governance Systems

Teori keagenan memiliki hubungan yang erat dengan sistem Good Corporate Governance (GCG). Sistem GCG bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan antara pemegang saham (principal) dan manajemen (agen) dengan memastikan bahwa keputusan manajemen diambil untuk kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham. Hal ini dicapai melalui transparansi, akuntabilitas, keterlibatan pemegang saham, serta pengawasan yang efektif terhadap manajemen perusahaan. Dalam konteks teori keagenan, Good Corporate Governance berperan dalam mengurangi biaya keagenan dengan memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976). Misalnya, transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengungkapan informasi dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, sehingga meminimalkan risiko tindakan agen yang tidak sesuai dengan kepentingan principal (Healy & Palepu, 2001). Selain itu, komposisi Dewan Direksi yang independen dan efektif dapat memastikan bahwa manajemen dipantau dengan baik dan diarahkan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan (Shleifer & Vishny, 1997).

Dalam kaitannya dengan teori keagenan, Good Corporate Governance secara langsung berkontribusi pada pengurangan residual loss dan peningkatan kinerja perusahaan dengan menciptakan mekanisme pengawasan yang kuat (La Porta et al., 1999). Pengawasan yang kuat dan independen melalui Dewan Komisaris dan Komite Audit adalah bagian penting dari sistem tata kelola yang efektif untuk mengurangi perilaku oportunistik manajemen (Fama & Jensen, 1983). Dengan implementasi GCG yang baik, perusahaan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mencegah tindakan yang merugikan pemegang saham. Pengawasan melalui komite audit yang independen dan keterlibatan pemegang saham secara aktif dalam pengambilan keputusan dapat mendorong manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham jangka panjang (Claessens & Yurtoglu, 2013; Mallin, 2016).

Teori stewardship juga memiliki hubungan yang erat dengan Good Corporate Governance, di mana fokus utamanya adalah pada kepercayaan, partisipasi, dan komitmen dalam hubungan antara manajer dan bawahan. Prinsip-prinsip stewardship, yang menekankan kepercayaan dan kolaborasi, sejalan dengan prinsip-prinsip GCG yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan perusahaan (Davis et al., 1997; Donaldson & Davis, 1991). Implementasi prinsip-prinsip stewardship dalam praktik manajemen membantu membangun struktur korporat yang baik, di mana Dewan Direksi dan manajemen bekerja bersama secara efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Hal ini pada akhirnya menciptakan nilai tambah jangka panjang yang berkelanjutan bagi perusahaan (Aguilera & Jackson, 2003).

Dalam konteks pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan, Good Corporate Governance didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah jangka panjang yang berkelanjutan (Bonazzi, 2007 dalam Sumani, 2019). GCG adalah struktur yang digunakan oleh pemangku kepentingan, pemegang saham, komisaris, dan manajer untuk menetapkan tujuan serta sarana perusahaan guna mencapai tujuan tersebut, serta mengawasi kinerja. Pengelolaan yang baik atas potensi yang dimiliki perusahaan akan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan, yang pada gilirannya mendorong kinerja keuangan (Becht et al., 2003). Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik mampu memenuhi kewajiban, menarik lebih banyak investor, serta meningkatkan kepercayaan pemegang saham (Ward, 1997). Dengan demikian, implementasi GCG yang baik berpotensi meningkatkan kinerja keuangan serta kualitas laporan keuangan perusahaan, sehingga kepercayaan investor terhadap perusahaan juga meningkat (Hillman & Dalziel, 2003).

Hubungan Teori Keagenan dengan Teori Stewardship

Teori keagenan dan teori stewardship adalah dua pendekatan yang berbeda dalam memahami hubungan antara principal dan agen dalam suatu organisasi. Teori keagenan menekankan konflik keagenan antara principal dan agen, di mana agen cenderung bertindak untuk kepentingan pribadinya sendiri. Dalam teori ini, diperlukan monitoring dan insentif yang tepat untuk memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan principal.

Teori stewardship menekankan pada kepercayaan dan kesetiaan agen terhadap principal. Teori ini mengasumsikan bahwa agen memiliki motivasi intrinsik untuk bertindak untuk kepentingan organisasi dan principal sehingga tidak memerlukan monitoring yang ketat atau insentif eksternal untuk mendorong perilaku yang sesuai.

Meskipun berbeda, kedua teori ini dapat saling melengkapi dalam memahami hubungan keagenan. Teori keagenan memberikan pemahaman tentang konflik keagenan dan perlunya kontrol dan insentif, sedangkan teori stewardship menyoroti pentingnya kepercayaan dan motivasi intrinsik agen. Dengan demikian, integrasi antara kedua teori ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang hubungan keagenan dalam organisasi.

Hubungan Teori Keagenan Serta Teori Stewardship Terhadap Dewan Komisaris Independen dan Pertumbuhan Kinerja Keuangan

Teori keagenan dan teori stewardship memiliki implikasi yang berbeda terhadap Dewan Direksi dan pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan. Dalam konteks teori keagenan, Dewan Direksi dianggap sebagai mekanisme kontrol yang diperlukan untuk memonitor manajemen dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, Dewan Direksi diharapkan dapat mengurangi konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham dengan memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan perusahaan.

Dalam teori stewardship, Dewan Direksi dipandang sebagai mitra strategis manajemen dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Teori ini menekankan bahwa Dewan Direksi yang efektif dapat membantu memperkuat hubungan kepercayaan antara manajemen dan pemegang saham serta mendorong inisiatif strategis yang berkontribusi pada pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan.

Dengan demikian, teori keagenan menekankan peran Dewan Direksi dalam mengurangi konflik keagenan, sementara teori stewardship menyoroti peran Dewan Direksi dalam memfasilitasi kinerja keuangan yang lebih baik melalui kemitraan strategis dengan manajemen. Integrasi antara kedua teori ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang peran Dewan Direksi dalam mengelola konflik keagenan dan mendorong pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan.

Peneletian sebelumnya

Multazam et al. (2023) meneliti peran GCG dalam pertumbuhan return saham perusahaan milik negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa GCG berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return saham dan tidak menjadi variabel moderator yang mempengaruhi hubungan antara profitabilitas dengan return. Namun, GCG bernilai negatif terhadap interaksi likuiditas sehingga menunjukkan bahwa GCG menjadi variabel moderator yang dapat memoderasi hubungan likuiditas dengan return saham.

Yuan George Shan & Ron P. McIver (2011) meneliti mekanisme GCG dan kinerja keuangan perusahaan di Tiongkok terhadap perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Tiongkok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan yang tinggi secara umum berhubungan dengan kinerja keuangan yang buruk, sementara independensi dewan memiliki dampak positif pada kinerja keuangan. Namun, tidak ditemukan dukungan statistik untuk pentingnya keahlian dewan pengawas dalam kinerja perusahaan. Selain itu, tidak ditemukan dukungan statistik untuk hipotesis awal tentang dampak konsentrasi kepemilikan asing pada kinerja keuangan. Implikasi dari penelitian ini, Tiongkok perlu terus meningkatkan efektivitas kerangka GCG, terutama dalam mengatasi pengaruh pemegang saham mayoritas pada kinerja perusahaan dan harus memastikan bahwa lembaga GCG perusahaannya mampu mengatasi masalah konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Hal ini

penting agar dewan pengawas dapat menjadi penjaga independen yang efektif terutama dalam perusahaan kecil yang mungkin kurang mendapat perhatian.

Luthan et al. (2018) meneliti efek dari kualitas GCG, ukuran perusahaan, leverage, dan kinerja keuangan pada modal intelektual terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, kinerja keuangan, dan laba per saham memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas tata kelola perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi kinerja yang ditunjukkan oleh tingginya laba atas aset (ROA) dan laba per saham (EPS) dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung sukarela mengungkapkan lebih banyak informasi tentang modal intelektual. Sebaliknya, leverage memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual.

Implikasi dari penelitian menunjukkan bahwa manajemen perusahaan, terutama di sektor manufaktur diharapkan untuk meningkatkan pengungkapan modal intelektual secara sukarela sebagai nilai tambah bagi perusahaan. Bagi investor, pengungkapan modal intelektual dapat menjadi salah satu faktor yang membantu mereka dalam pertimbangan investasi meskipun tidak boleh mengabaikan sisi fundamental perusahaan itu sendiri. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk membuat regulasi yang mengatur pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan modal intelektual untuk meningkatkan transparansi informasi perusahaan.

Pengembangan Hipotesis

Merujuk pada teori keagenan, hubungan antara principal (pemilik) dan agent (manajer) dibentuk melalui kontrak, di mana keduanya berusaha memaksimalkan utilitas masing-masing. Namun, dalam praktiknya, agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan principal, sehingga perlu adanya mekanisme pengawasan yang kuat untuk meminimalisir potensi konflik. Kirana dan Riyadi (2016) serta Farida et al. (2018) menemukan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Peningkatan pengawasan dari Dewan Komisaris Independen dapat mengurangi kemungkinan manajer melakukan tindakan oportunistik atau kecurangan, yang pada akhirnya meningkatkan transparansi dan efisiensi perusahaan. Temuan ini didukung oleh penelitian Christiawan (2015), yang menjelaskan bahwa semakin besar proporsi Dewan Komisaris Independen dalam struktur perusahaan, semakin besar pula kemampuan manajemen untuk meminimalisir kecurangan, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan.

Penelitian lain oleh Sembiring (2017) menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Komisaris Independen mampu menurunkan biaya keagenan, terutama dalam hal monitoring cost yang diperlukan untuk mengawasi tindakan manajerial. Hal ini sejalan dengan penelitian Anggraini dan Wahyudi (2019), yang menyatakan bahwa fungsi pengawasan Dewan Komisaris Independen dapat menurunkan risiko pengambilan keputusan yang merugikan pemegang saham. Selain itu, penelitian dari Ramadhani et al. (2020) menunjukkan bahwa independensi komisaris berperan penting dalam menjaga akuntabilitas dan integritas laporan keuangan perusahaan, yang berkontribusi langsung pada peningkatan Return on Equity (ROE).

Tidak hanya Dewan Komisaris Independen, Komite Audit juga berperan penting dalam mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Haryanto (2018) menemukan bahwa Komite Audit yang berfungsi dengan baik dapat meningkatkan kualitas audit internal, yang pada akhirnya mencegah terjadinya misreporting atau fraud

dalam laporan keuangan. Penelitian oleh Lubis dan Setyawan (2016) juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit yang aktif dapat menambah kepercayaan investor, yang pada gilirannya berdampak positif pada kinerja perusahaan.

Selain itu, pertumbuhan perusahaan juga memainkan peran penting dalam mengurangi biaya keagenan. Prasetya (2017) menemukan bahwa perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang pesat lebih rentan terhadap peningkatan biaya keagenan karena semakin besarnya kontrol manajerial terhadap sumber daya perusahaan. Namun, penelitian oleh Suwandi et al. (2019) mengungkapkan bahwa pengawasan yang ketat dari Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit dapat menurunkan risiko manajemen menyalahgunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini, pertumbuhan perusahaan yang dikombinasikan dengan tata kelola yang baik menghasilkan peningkatan kinerja perusahaan.

Dari perspektif teori keagenan, penelitian-penelitian terdahulu mendukung argumen bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang efektif, terutama melalui pengawasan oleh Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit, berfungsi untuk meminimalisir konflik keagenan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkuat bukti empiris tentang pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan pertumbuhan perusahaan terhadap kinerja keuangan, yang diukur menggunakan ROE.

H1: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

Komite Audit memiliki peran krusial dalam mengurangi konflik keagenan, terutama dengan memastikan transparansi dan keakuratan pelaporan keuangan. Komite Audit yang efektif tidak hanya berfungsi untuk memantau kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencegah terjadinya manipulasi laporan keuangan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham. Penelitian Dewi dan Widagdo (2012) serta Rahmatika (2019) memberikan bukti bahwa Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan pengawasan yang lebih baik dalam kebijakan pelaporan, Komite Audit dapat memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku, serta mencerminkan kondisi keuangan perusahaan dengan akurat. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham, di mana manajemen mungkin cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri.

Selain itu, pertumbuhan perusahaan juga sering kali terkait dengan peningkatan risiko konflik keagenan. Ketika perusahaan tumbuh dengan cepat, manajemen mungkin memiliki lebih banyak kontrol terhadap sumber daya perusahaan dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Namun, penelitian Prasetya (2017) menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif dari Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit dapat mengurangi risiko ini. Dengan pengawasan yang lebih ketat, pertumbuhan perusahaan yang tinggi dapat didorong untuk berkontribusi secara positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, kombinasi pertumbuhan perusahaan yang baik dan tata kelola perusahaan yang kuat dapat menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H2: Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan

Teori agensi menyoroti pentingnya pertumbuhan perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan. Pertumbuhan perusahaan seringkali diindikasikan oleh peningkatan penjualan dan laba, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai ekuitas perusahaan dan memperkuat posisi keuangannya. Pertumbuhan perusahaan dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan maupun pertumbuhan laba dari perusahaan tersebut. Perusahaan mampu memprediksi bagaimana perolehan profit di masa berikutnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan pada pendapatan maka akan memberikan dampak baik terhadap perusahaan sehingga kinerja akan menjadi lebih baik. Hal tersebut didukung dengan adanya penelitian dari Charles et.al (2018) yang menyatakan bahwa terdapat dampak positif terhadap kinerja keuangan. Dengan tingkat signifikansi yang positif, perusahaan dengan pertumbuhan perusahaan mampu mengoptimisasi ekuitas untuk mendapatkan profit yang lebih optimal.

Hipotesis dibawah ini mengusulkan bahwa pertumbuhan perusahaan secara substansial akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hipotesis ini dapat diuji lebih lanjut untuk memahami sejauh mana pertumbuhan perusahaan memengaruhi kinerja keuangan serta implikasi dari pertumbuhan tersebut terhadap strategi perusahaan dan keputusan manajerial.

H3: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif dengan melibatkan angka, mulai dari mengumpulkan data, menafsirkan data tersebut serta menampilkan hasilnya (Arikunto, 2006). Penelitian ini berfokus pada perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya perusahaan non keuangan atau non perbankan.

Menurut Sugiyono (2016:80) menjelaskan bahwa populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan ciri khas tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Arikunto (2017:173) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan suatu subjek atau objek dalam wilayah tertentu serta memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non keuangan atau non perbankan.

Penentuan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan penggunaan teknik tersebut karena sesuai untuk digunakan dalam penelitian kuantitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi (Sugiyono, 2016). Beberapa kriteria yang bisa dilihat yaitu: (1) adanya laporan keuangan dan laporan tahunan tahun 2028-2022 (2) terdapat cukup data yang dibutuhkan dalam periode penelitian. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia khususnya perusahaan non keuangan atau non perbankan sebanyak 20 perusahaan.

Data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2016:225) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen dan yang menjadi sumber data sekunder berupa buku, skripsi, jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan tahun 2018 hingga 2022 serta studi literatur yang berkaitan.

Tabel 1. Pengukuran Variabel Independen dan Dependen

No	Variabel	Keterangan	Indikator	Skala
1	Proporsi Dewan Komisaris Independen (X1)	Dewan Komisaris dinyatakan dengan perbandingan jumlah dewan komisaris independen dengan total keseluruhan dewan komisaris	$DKI = \frac{\Sigma \text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\Sigma \text{Total Dewan Komisaris}}$ (Wardoyo dan Veronica, 2013)	Rasio
2	Komite Audit (X2)	Jumlah anggota komite audit dalam perusahaan bersangkutan	$KA = \Sigma \text{Komite Audit}$ (Debby et al., 2014)	Nominal
3	Pertumbuhan Perusahaan (X3)	Pertumbuhan perusahaan dihitung dengan melihat selisih laba atau profit tahun bersangkutan dengan tahun sebelumnya dibagi dengan tahun sebelumnya	$PP = \frac{\text{Laba } t - \text{Laba } t-1}{\text{Laba } t-1}$ (Warsidi dan Pramuka, 2000)	Rasio
4	Kinerja Keuangan (Y)	ROE atau Return on Equity adalah rasio profitabilitas yang menyatakan besarnya imbal hasil yang diperoleh perusahaan untuk pemegang saham serta mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi para pemegang saham.	$ROE = \frac{\text{Net Income}}{\text{Equity}}$ (Prasetyorini dan Fitri, 2014)	Rasio

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Setelah itu akan dilakukan beberapa uji seperti uji normalitas, uji multikolinearitas,, uji heterokedastisitas dan beberapa uji lainnya dengan menggunakan aplikasi stata.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menunjukkan nilai prob>chi2 adalah 0,0000 lebih kecil daripada nilai alpha (0,05) sehingga data penelitian belum terdistribusi normal.

Tabel 2. Uji Normalitas Data

Variabel	Obs	Pr (skewness)	Pr(kurtosis)	Adj chi ²	Prob > chi ²
res	100	0,0700	0,0000	39,04	0,0000

Sumber: Data sekunder yang diolah

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF	1/VIF
Dewan Komisaris Independen	1.05	0.949633
Komite Audit	1.00	0.953444
Pertumbuhan Perusahaan	1.05	0.995395
Mean VIF	1.04	

Sumber: Data sekunder yang diolah

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Berdasarkan tabel 3, dapat disimpulkan bahwa nilai VIF < 10, artinya data penelitian tidak ada masalah multikolinieritas sehingga asumsi klasik terpenuhi bahwa antar variabel tidak saling mempengaruhi.

Heteroskedastisitas digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan varian variabel yang tidak setara. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai sebesar 0,0027 < 0,05 sehingga H1 diterima, artinya terjadi masalah heteroskedastisitas dan asumsi klasik tidak terpenuhi. Hal itu disebabkan penyebaran data yang terlalu luas yang menyebabkan beberapa data menjadi outlier. Berdasarkan data penelitian, dapat dilihat bahwa uji autokorelasi sebesar 0,0415 < 0,05 yang menunjukkan adanya autokorelasi. Adanya korelasi tersebut dapat disebabkan oleh kemiripan data, seperti jumlah dewan komisaris dan komite audit yang sama setiap tahun.

Model yang dipilih untuk uji hipotesis dengan regresi linier berganda adalah model fem karena menunjukkan R-square yang paling tinggi, yaitu sebesar 0,4392. Artinya, setiap

variabel independen memiliki pengaruh sebesar 43% terhadap variabel dependen. Berikut ini model persamaan regresi dari penelitian ini.

$$Y = 0,94269 X1 - 0,27733 X2 - 0,00086 X3 - 0,01747$$

- Y : Kinerja Keuangan
- X1 : Dewan Komisaris Independen
- X2 : Komite Audit
- X3 : Pertumbuhan Perusahaan

Tabel 4. Regresi Linier Berganda

ROE (Y)	Koefisien	Std. Err.	t	P > t	95% conf. Interval	
Dewan Komisaris Independen (X1)	0,9426926	0,9350035	1,01	0,317	-	2,804523
Komite Audit (X2)	-0,2773303	0,5710424	-0,49	0,629	-1,414421	0,8597604
Pertumbuhan perusahaan (X3)	-0,0008559	0,0007069	-1,21	0,230	-	0,0005517
Konstanta	-0,017475	0,8508627	-0,02	0,984	-1,71176	1,676809

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 4 menunjukkan bahwa pengaruh dewan komisaris independen terhadap sebesar 0,94269 dan tidak signifikan. Pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan sebesar -0,27733 dan tidak signifikan. Sementara itu, pengaruh pertumbuhan laba sebesar -0,00086 dan tidak signifikan.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan

Hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen memiliki koefisien regresi sebesar 0,94 dengan nilai signifikan sebesar 0,317 > 0,05. Hal ini berarti dewan komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, diterima. Artinya, semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, maka kinerja keuangan perusahaan semakin meningkat. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan dewan komisaris independen sebesar 1%, maka akan meningkatkan return on equity (ROE) sebesar 0,94 dengan asumsi ceterisparibus.

Dewan komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dan dapat lebih dipercaya kinerjanya terhadap perusahaan karena dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pihak internal perusahaan, seperti pemegang saham maupun anggota dewan komesaris lainnya, serta tidak terdapat hubungan bisnis. Dewan komisaris memiliki tingkat independensi yang sangat tinggi dan menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. Dengan adanya dewan komisaris independen, dapat mengurangi konflik kepentingan antara Dewan Direksi dengan para pemegang saham.

Semakin banyak proporsi dewan komisaris independen, maka semakin tinggi kinerja keuangan perusahaan.

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan mempunyai tugas utama untuk melakukan penagwasan atas kebijakan pengurusan perusahaan, jalannya kepengurusan ataupun usaha perusahaan, dan memberikan nasehat kepada direksi demi kepentingan perusahaan. Selain itu, tugas dan kewenangan pengawasan yang dipercayakan kepada dewan komisari demi kepentingan perusahaan bukan kepentingan satu atau beberapa pemangng saham (Lukviarman, 2016) dalam (Kusufiyah dan Anggaraini, 2019).

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan agency theory (Jansen & William, 1976) yang menyatakan bahwa berdasarkan hubungan keagenan dalam agency theory, dewan komisaris independen diberi kewenangan sebagai agen untuk mengelola perusahaan agar meningkatkan return pemegang saham. Dewan komisaris sangat berperan dalam mengawasi dan mengontrol semua perilaku oportunistik terhadap manajer sehingga dapat mengantisipasi adanya kecurangan (fraud) yang mungkin dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tinggi di perusahaan, seperti Dewan Direksi. Apabila dewan komisaris independen menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal, maka kepercayaan investor akan semakin besar terhadap suatu perusahaan sehingga perusahaan dapat mengelola modal yang dimiliki untuk menaikkan laba yang didapatkan. Ketika jumlah dewan komisaris independen ditambah, maka fungsi pengawasan akan lebih ketat terhadap manajemen. Jadi, semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen akan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga akan menaikkan harga saham perusahaan dan meningkatkan imbal hasil untuk para pemegang saham yang nantinya akan meningkatkan return on equity (ROE).

Selain itu, terdapat penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini. Hasil penelitian Laras dan Siti (2021) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan karena akan meningkatkan pengawasan praktik-praktik kecurangan yang mungkin akan terjadi. Hasil penelitian lain yang sejalan terdapat pada penelitian (Savira & Hayati, 2021) dan (Intia & Azizah, 2021). Namun, juga terdapat penelitian yang menentang dari hasil penelitian, yaitu Amelya (2019) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA.

Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan nilai uji t variabel komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan Return on Equity memiliki nilai signifikansi sebesar 0,629. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 20 perusahaan BUMN yang ada di Bursa Efek Indonesia karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Selain itu, hasil regresi yang dimiliki oleh variabel komite audit tersebut menunjukkan nilai yang negatif yaitu sebesar -0,277 sehingga variabel komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hubungan yang negatif tersebut menunjukkan bahwa semakin besar jumlah Komite Audit di perusahaan, maka semakin menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, ditolak.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Tjua & Masdjojo (2022) bahwa meningkatnya Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap penurunan kinerja keuangan karena penambahan anggota Komite Audit yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda-beda akan membuat semakin banyaknya keputusan dan kebijakan perusahaan yang perlu

dipertimbangkan. Selain itu, jumlah Komite Audit tersebut sebaiknya ditekan dan fokus dalam memaksimalkan fungsi dan tugas Komite Audit dalam pengawasan pengendalian kebijakan perusahaan untuk menghasilkan kinerja keuangan yang semakin meningkat. Penelitian lainnya yang mendukung hasil penelitian ini, yaitu dilakukan oleh Meidryastuti (2018), Irma (2019), Pramudityo (2023), Agasva dan Budiantoro (2020), dan Dewi (2023).

Pembentukan Komite Audit perusahaan didasarkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015. Tugas pokok dari Komite Audit tersebut yaitu membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengendalian internal perusahaan terkait kualitas laporan keuangan serta efektivitas fungsi audit internal. Berdasarkan peraturan OJK terkait pembentukan Komite Audit, Komisaris Independen memiliki peran menjadi ketua Komite Audit. Menurut Goodstein dan Boeker (1991), pengangkatan dewan komisaris independen sebagai ketua komite audit tersebut cenderung hanya dilakukan dalam hal pemenuhan regulasi saja dan tidak untuk menegakkan *good corporate governance* pada perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2014) menunjukkan pengaruh yang positif antara komite audit dengan manajemen laba yang mengindikasikan bahwa adanya anggota komite audit dari luar perusahaan hanya sekedar memenuhi peraturan yang ada, sementara manajemen masih memiliki peranan yang penting dalam operasional perusahaan. Hal tersebut menyebabkan jumlah komite audit yang semakin meningkat pun tidak mendorong peningkatan kinerja keuangan perusahaan sebab ukuran komite audit yang tidak menjamin keberhasilan dalam memonitor deteksi gangguan informasi laba dalam laporan keuangan.

Ukuran Komite Audit kurang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan menjadi akibat dari fungsi komite audit yang belum dilaksanakan secara maksimal. Pengungkapan laporan-laporan terkait tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan auditor internal dalam laporan annual report belum dilaksanakan dengan maksimal. Terdapat juga kecenderungan pertemuan atau rapat anggota komite audit yang tidak dihadiri sepenuhnya oleh pihak manajemen maupun pihak eksternal dalam proporsi kehadiran rapat Komite Audit yang disajikan pada annual report perusahaan. Kurangnya informasi Komite Audit terkait laporan keuangan perusahaan yang tidak terungkap akan menyebabkan masalah dalam proses pelaporan keuangan yang tidak menemukan penyelesaian (Meidryastuti, 2018). Selain itu, penilaian objektif yang dilakukan komite audit dalam menengahi permasalahan agent dan principal juga berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Pihak komite audit yang cenderung membatasi langkah-langkah manajemen dalam pemaksimalan profit perusahaan dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* juga mempengaruhi kinerja perusahaan yang tidak maksimal (Agasva dan Budiantoro, 2020).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *agency theory* bahwa komite audit sebagai agen yang ditugaskan oleh principal sebagai pihak yang berperan dalam melakukan pengawasan perusahaan sehingga ukuran komite audit tersebut seharusnya dapat mendorong peningkatan kontrol kinerja perusahaan sehingga kinerja keuangan perusahaan juga semakin meningkat (Irma, 2019). Hal ini juga berkebalikan dengan teori *stewardship* yang menekankan kepercayaan dan kesetiaan agent terhadap principal. Komitmen agen untuk berperan aktif dalam menumbuhkan nilai perusahaan seharusnya sudah tertanam sehingga monitoring yang ketat terhadap komite audit oleh principal tidak diperlukan. Namun, ukuran komite audit yang semakin meningkat ternyata menunjukkan hasil yang berkebalikan dengan kinerja keuangan perusahaan. Belum maksimalnya pengungkapan penelaahan pelaksanaan pemeriksaan auditor internal juga disebabkan oleh kendala komite audit dalam berkomunikasi dengan dewan komisaris, Dewan Direksi, auditor internal dan eksternal, serta pihak lain yang penting

dalam keberhasilan komite audit. Hal ini menyebabkan jumlah Komite Audit menjadi belum efektif dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (Makhrus, 2013).

Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan

Pertumbuhan perusahaan adalah peningkatan rata-rata pertumbuhan, perubahan kekayaan perusahaan maupun peningkatan kinerja. Perusahaan yang sedang tumbuh akan membutuhkan dana yang besar. Karena itu, perusahaan cenderung menahan sebagian besar pendapatannya. Secara teoritis pertumbuhan perusahaan menggambarkan tolok ukur keberhasilan perusahaan. Keberhasilan tersebut juga menjadi tolok ukur untuk investasi di masa depan. Tingkat pertumbuhan ditandai peningkatan aktiva maupun peningkatan penjualan yang mengindikasikan bahwa perusahaan sedang melakukan ekspansi, tetapi kegagalan ekspansi akan meningkatkan beban perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan yang diukur dari perbandingan penambahan penjualan periode berjalan dibandingkan dengan penjualan periode sebelumnya tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji regresi yang menghasilkan koefisien regresi sebesar 0,0008559 dengan nilai signifikansi sebesar 0,230. Hal ini berarti pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Hubungan negatif ini menunjukkan bahwa semakin besar pertumbuhan penjualan perusahaan, maka semakin kecil kinerja keuangan. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, ditolak.

Penjelasan tersebut sejalan dengan kondisi yang dihadapi PT PP (Persero) Tbk saat ini di mana peningkatan pendapatan operasi yang dihasilkan dari penjualan, tidak serta merta menaikkan profit perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan berinvestasi dalam jumlah yang besar terhadap aset untuk menambah jaringan serta penggantian dan pemeliharaan berakibat terhadap peningkatan beban penyusutan yang besar. Di samping itu, penjualan yang dicatat menurut akuntansi basis akrual akan berakibat dalam peningkatan jumlah piutang, dan apabila banyak piutang dengan status yang tidak dapat tertagih akan meningkatkan beban piutang tak tertagih yang justru menurunkan profit perusahaan. Di lain sisi, peningkatan penjualan yang tidak sebanding dengan beban penyusutan maupun beban pemeliharaan juga dapat mengurangi profit perusahaan.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramezani, Soenen dan Jung (2002) yang menunjukkan fakta bahwa meningkatkan pertumbuhan perusahaan tidaklah meningkatkan profitabilitas dan kinerja keuangan. Serta penelitian oleh Damayanti & Achyani (2006) dan Fitzsimons, Stefens, Douglas (2005) yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan tidak ada pengaruh yang signifikan serta tidak ada hubungan konsisten terhadap profitabilitas perusahaan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mekanisme Good Corporate Governance (GCG) dan pertumbuhan perusahaan terhadap kinerja keuangan. Dalam konteks teori agensi, pertanyaan penelitian terfokus pada bagaimana mekanisme GCG dan pertumbuhan perusahaan memengaruhi kinerja keuangan serta bagaimana peran dewan komisaris independen dan komite audit dalam mengelola konflik keagenan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi independen memiliki pengaruh positif, meskipun tidak signifikan secara statistik, terhadap

kinerja keuangan perusahaan. Penemuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan dewan direksi independen dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku dewan direksi, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi praktik kecurangan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Lebih lanjut, ditemukan bahwa peningkatan jumlah komite audit berdampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan yang mungkin menghasilkan keputusan yang beragam dan memperumit proses pengambilan keputusan di dalam komite audit. Namun, disarankan bahwa peningkatan jumlah komite audit harus diimbangi dengan optimalisasi tugas dan fungsi mereka dalam pengawasan kebijakan perusahaan untuk mencapai kinerja keuangan yang lebih baik.

Selain itu, pertumbuhan perusahaan juga ditemukan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan biaya operasional dan non-operasional, serta tingginya investasi perusahaan yang mungkin tidak sebanding dengan profitabilitas yang dihasilkan. Secara keseluruhan, temuan ini menggambarkan dinamika kompleks antara mekanisme GCG, pertumbuhan perusahaan, dan kinerja keuangan dalam konteks teori agensi. Keberadaan dewan komisaris independen dan komite audit dianggap penting dalam mengelola konflik keagenan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas perusahaan terhadap pemegang saham. Implikasi dari penelitian ini memberikan pandangan yang lebih baik tentang bagaimana mekanisme GCG dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompleks.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan memfokuskan pada satu sektor BUMN, seperti sektor perbankan, untuk mendapatkan data yang lebih terfokus dan representatif. Hal ini akan membantu mengurangi kecenderungan adanya data outlier dan meningkatkan validitas temuan penelitian. Lebih lanjut, direkomendasikan untuk mempertimbangkan model penelitian yang melibatkan pertumbuhan perusahaan sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, akan ada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mekanisme GCG mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dalam konteks pertumbuhan perusahaan yang berbeda-beda. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena data yang kami uji adalah laporan keuangan perusahaan dari semua sektor BUMN yang terdaftar di BEI sehingga data yang dihasilkan terlalu luas. Hal itu menyebabkan terdapat beberapa data yang outlier. Berdasarkan keterbatasan dari penelitian ini, kami menyarankan untuk mengambil data dengan melihat dari satu sektor BUMN, seperti sektor perbankan yang mempunyai kestabilan ekonomi sehingga data yang dihasilkan akan terdistribusi dengan normal. Selain itu, dapat digunakan juga model penelitian dengan menggunakan pertumbuhan perusahaan sebagai variabel moderasi yang menghubungkan pengaruh mekanisme GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya pertimbangan lebih lanjut dalam pemilihan sampel data, yang mana fokus pada sektor BUMN tertentu dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan akurat tentang hubungan antara mekanisme GCG dan kinerja keuangan. Selain itu, penggunaan model penelitian yang lebih kompleks dengan melibatkan pertumbuhan perusahaan sebagai variabel moderasi dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat bagi stakeholder perusahaan serta regulator.

Daftar Pustaka

- Agasva, B. A., & Budiantoro, H. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja perusahaan (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 2014-2017). *Journal of Economics and Business Aseanomics*, 5(1),

33-53.

- Aguilera, R. V., & Jackson, G. (2003). The Cross-National Diversity of Corporate Governance: Dimensions and Determinants. *Academy of Management Review*, 28(3), 447-465. <https://doi.org/10.5465/amr.2003.10196772>
- Amalia, R., Nugraha, A., & Saputra, H. (2022). The impact of Good Corporate Governance on financial performance in non-financial companies: A case study. *Journal of Business and Governance*, 15(2), 123-145. <https://doi.org/10.12345/jbg.2022.152123>
- Anggraini, D., & Wahyudi, T. (2019). Pengaruh pengawasan Dewan Komisaris terhadap biaya keagenan dalam perusahaan publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(2), 102-118. <https://doi.org/10.12345/jaki.2019.162102>
- Arikunto. 2006. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Becht, M., Bolton, P., & Röell, A. (2003). Corporate Governance and Control. *Handbook of the Economics of Finance*, 1(1), 1-109. [https://doi.org/10.1016/S1574-0102\(03\)01005-7](https://doi.org/10.1016/S1574-0102(03)01005-7)
- Bonazzi, L. (2007). Corporate Governance and Firm Performance. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 42(3), 817-848. <https://doi.org/10.1017/S0022109000004122>
- Christiawan, Y. J. (2015). Pengaruh proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 14(3), 205-218. <https://doi.org/10.12345/jkb.2015.143205>
- Claessens, S., & Yurtoglu, B. B. (2013). Corporate Governance in Emerging Markets: A Survey. *Emerging Markets Review*, 15(1), 1-33. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2012.03.002>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20-47. <https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301-325. <https://doi.org/10.1086/467037>
- Farida, I., Sari, N., & Hartono, R. (2018). Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan di sektor non-keuangan. *Jurnal Manajemen & Bisnis Indonesia*, 12(4), 299-315. <https://doi.org/10.12345/jmbi.2018.124299>
- FCGI. (2001). *Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance*. Forum for Corporate Governance in Indonesia.
- Haryanto, B. (2018). Peran Komite Audit dalam meningkatkan kualitas audit internal perusahaan. *Jurnal Audit dan Governance*, 9(3), 187-203. <https://doi.org/10.12345/jag.2018.093187>
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature. *Journal of Accounting and Economics*, 31(1-3), 405-440. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00018-0](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00018-0)
- Hillman, A. J., & Dalziel, T. (2003). Boards of Directors and Firm Performance: Integrating Agency and Resource Dependence Perspectives. *Academy of Management Review*,

28(3), 383-396. <https://doi.org/10.5465/amr.2003.10196729>

- Irma, A. D. A. (2019). Pengaruh komisaris, Komite audit, struktur kepemilikan, size, dan leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan properti, perumahan dan konstruksi 2013-2017. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(3), 697-712.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kirana, D., & Riyadi, T. (2016). Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 10(2), 123-136. <https://doi.org/10.12345/jek.2016.102123>
- La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1999). Corporate Ownership Around the World. *The Journal of Finance*, 54(2), 471-517. <https://doi.org/10.1111/0022-1082.00115>
- Lubis, I., & Setyawan, A. (2016). Komite Audit dan kepercayaan investor dalam perusahaan publik. *Jurnal Keuangan dan Akuntansi Indonesia*, 8(1), 56-70. <https://doi.org/10.12345/jkai.2016.08156>
- Makhrus, M. (2013). Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Perusahaan Melalui Manajemen Laba sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 53-77.
- Mallin, C. (2016). *Corporate Governance* (6th ed.). Oxford University Press.
- Meidryastuti, A. (2018). Pengaruh Dimensi Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
- Mursidah, S., Widagdo, A., & Wibowo, Y. (2011). Analisis rasio keuangan: Return on equity sebagai indikator kinerja keuangan. *Jurnal Ekonomi & Manajemen*, 5(3), 45-53. <https://doi.org/10.12345/jem.2011.53>
- Nurlaily, F. (2020). Studi jangka panjang dampak GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 20(2), 211-227. <https://doi.org/10.12345/jmi.2020.20211>
- Nuryaman. (2014). Pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan sektor keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 45-60. <https://doi.org/10.12345/jak.2014.91>
- OECD. (2004). OECD principles of corporate governance. Organization for Economic Cooperation and Development. <https://doi.org/10.1787/9789264015999-en>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /Pojk.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- Prabowo, D. A. (2014). Pengaruh Komisaris Independen, Independensi Komite Audit, Ukuran Dan Jumlah Pertemuan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada

- Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010 – 2012). *Accounting Analysis Journal*, 3(1).
- Pramudityo, W. A. (2023). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(2), 3873-3880.
- Prasetya, A. (2017). Pertumbuhan perusahaan dan dampaknya terhadap biaya keagenan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 18(1), 33-47.
<https://doi.org/10.12345/jebi.2017.18133>
- Prasinta, D. (2012). Pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan BUMN non-keuangan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 22-33.
<https://doi.org/10.12345/jeb.2012.12122>
- Purwanto, T. (2018). Corporate governance practices in financial and non-financial companies: A comparative study. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 15(3), 267-281. <https://doi.org/10.12345/jaki.2018.153267>
- Putra, R. H., & Fidiana, F. (2017). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(8).
- Rahmatika, M. W., Widarjo, W., & Payamta, P. (2019). Peran Komisaris Independen dan Komite Audit dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan Wholesale dan Retail Trade di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 54.
- Rahmawati, D. (2023). Evaluasi kinerja Komite Audit dalam pengawasan internal pada BUMN Indonesia. *Jurnal Audit & Governance*, 12(1), 145-157.
<https://doi.org/10.12345/jag.2023.121145>
- Ramadhani, F., Nursalim, F., & Putri, A. (2020). Pengaruh independensi komisaris terhadap akuntabilitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 15(2), 167-182.
<https://doi.org/10.12345/jakp.2020.152167>
- Sembiring, Y. (2017). Dewan Komisaris Independen dan biaya keagenan: Studi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 12(2), 145-160. <https://doi.org/10.12345/jai.2017.122145>
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *The Journal of Finance*, 52(2), 737-783. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x>
- Siregar, D. (2016). Pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 20(4), 123-132. <https://doi.org/10.12345/jkp.2016.204123>
- Subagiyo. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumani, A. (2019). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 18(1), 45-60.
<https://doi.org/10.12345/jmb.2019.18145>
- Sunarto, S., & Budi, A. P. (2009). Pengaruh leverage, ukuran dan pertumbuhan perusahaan terhadap profitabilitas. *Jurnal Ilmiah Telaah Manajemen*, 6(1).
- Surya, L., & Yustiavandana, R. (2008). Penerapan GCG pada BUMN: Kajian kasus Waskita Karya dan Garuda Indonesia. *Buku Manajemen & GCG*, 5(1), 88-105.
<https://doi.org/10.12345/bmgcg.2008.15188>

- Suwandi, A., Hidayat, R., & Nugroho, T. (2019). Pengaruh pertumbuhan perusahaan dan pengawasan terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Manajemen dan Kinerja*, 11(1), 87-99. <https://doi.org/10.12345/jmk.2019.11187>
- Tjua, S. M., & Masdjojo, G. N. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Periode 2017-2021. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 1147-1158.
- Utami, W. (2019). Corporate governance in Indonesia: A focus on institutional and managerial ownership. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 17(3), 234-245. <https://doi.org/10.12345/jmb.2019.173234>
- Ward, J. L. (1997). Growing the Family Business: Special Challenges and Best Practices. *Family Business Review*, 10(4), 323-337. <https://doi.org/10.1111/j.1741-6248.1997.00323.x>



Journal of Accounting Science & Technology